

PERAN DAN TANTANGAN PEREMPUAN
DALAM MEWUJUDKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Annisa Wahid,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
email: Annisawahid8@gmail.com,

Rifki Rosyad
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
email: Rifkirosyad8@gmail.com

Abstract: Since the enactment of Regional Autonomy in Indonesia, intolerance has continued to increase in various regions. This can be seen from the rampant cases of terrorism and radicalism that have penetrated Indonesian society. Indonesia is ranked 37th with the highest cases of terrorism and radicalism globally. This of course raises a lot loss, not only material but also the psychological and mental health of people who are worried about the safety of their lives. The government has made various efforts to reduce cases of intolerance (such as radicalism and terrorism) and maintain inter-religious harmony. One way is by echoing the concept of religious moderation. Realizing religious moderation requires the active role of all parties, including women. Women have great potential in realizing and maintaining the tolerance that is needed in this diverse Indonesia. This study aims to highlight the role of women and the challenges faced by women in realizing religious moderation in Indonesia. This study uses a literary method in the form of a qualitative descriptive method using gender theory. The results of this study indicate that the role of women will be the basic capital in realizing moderation in themselves, their families and society. In realizing religious moderation, women face challenges such as the occurrence of gender gaps, subordination, multiple roles and gender stereotypes.

Keywords: religious moderation, roles, challenges of women

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan tujuan dari negara Indonesia. Oleh karena itu dorongan untuk berkomitmen akan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu “keniscayaan” yang harus melekat dalam diri seluruh warga negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal rakyat Indonesia untuk bersatu. Kemajemukan bangsa yang multikultural merupakan kekayaan kita yang menjadi sumber kekuatan, dan juga sekaligus menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik sekarang maupun dimasa mendatang. Oleh karena itu, keanekaragaman yang kita miliki harus kita syukuri dan hormati dengan sepenuh hati serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh bangsa Indonesia sudah semestinya bangga memiliki Pancasila sebagai landasan dan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh Indonesia dengan segala kekayaan dan keragamannya. Hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan permufakatan bersama yang dapat diterima semua paham, element golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Keragaman dan kemajemukan yang dimiliki Indonesia pada masa lampau tidak menimbulkan masalah dikarenakan kurangnya interaksi antar masyarakat sebab faktor geografis kepulauan. Bangsa Indonesia yang pluralistik dan multikulturalistik dengan keanekaragaman agama mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, dan sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik. Bangsa Indonesia memang merupakan bangsa yang majemuk secara agama dan memiliki jumlah penduduk sangat besar. Dengan merujuk pada Sensus Penduduk 2021 yang merupakan sensus terakhir, jumlah penduduk Indonesia adalah 273.380.000 jiwa. Berdasarkan hasil sensus tersebut, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Sebanyak 238,09 juta jiwa (86,93 persen) penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Kemudian secara berturut-turut diikuti oleh penganut agama Kristen sebanyak 20,45 juta jiwa (7,47 persen), penganut agama Katolik sebanyak 8,42 juta jiwa (3,08 persen), penganut Hindu sebanyak 4 juta jiwa (1,71 persen), penganut Buddha sebanyak 2,7 juta jiwa (0,72 persen), penganut

Khonghucu sebanyak 0,03 juta jiwa (0,03 persen), dan agama lainnya 0,05 persen.¹

Seiring dengan kemajuan teknologi, kemajemukan masyarakat nusantara tidak hanya menjadi keunikan, namun bisa menjadi masalah besar karena sangat berpotensi melahirkan konflik yang dapat menyebabkan perpecahan persatuan Indonesia. Seiring berjalannya waktu semakin bermunculan pula konflik bahkan terjadinya kekerasan yang disebabkan adanya sikap intoleran terhadap perbedaan, terutama aspek agama. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia memiliki kecenderungan yang kuat terhadap keyakinan sehingga terbelah dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas agama masing-masing.² Dalam tiga tahun terakhir sebuah lembaga riset yaitu setara Institut mencatat terjadi peningkatan kasus Intoleransi beragama di Indonesia. Tahun 2018 terdapat 202 kasus yaitu peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, tahun 2020 terdapat 237 kasus dan tahun 2021 terdapat 413 kasus yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kasus intoleransi ini berupa pelarangan pendirian tempat ibadah, sikap tidak berteman dengan orang di luar agama, pelarangan perayaan agama tertentu dan lainnya. Terjadinya konflik SARA (suku, ras antar golongan dan agama) di Poso, Madura dan Sampit yang memakan banyak korban dari warga sipil telah membuka mata bahwa persatuan di Negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja.³

Mulai peristiwa tersebut, konflik SARA lainnya terus bermunculan, berita intoleransi terakhir ialah tentang pembakaran gereja di Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Maraknya kasus-kasus kekerasan dalam beragama juga menunjukkan bahwa pemahaman semboyan yang telah disepakati “Bhineka Tunggal Ika” belum mampu diamankan secara maksimal oleh warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang rukun, pemerintah melalui Kementerian Agama

¹ Marina Elina, *Moderasi Beragama dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama*. Palembang: Jurnal UIN Raden Fatah, 2021, 35

² L. W Evelina, *Analisis Isu S (Suku) A (Agama) R (Ras) A (Antar Golongan) di Media Social Indonesia*. Jakarta: Jurnal ULTIMA. 2015. 35

³ H. Nugroho, *Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan Implikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 1997, 32

telah melakukan berbagai upaya dengan merumuskan regulasi yang mengatur pola kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Dimulai era Menteri Agama Mukti Ali membangun konsep kerukunan antar umat beragama, mengadakan berbagai dialog-dialog keagamaan di tingkat nasional maupun daerah, dan usaha terkini pemerintah ialah implementasi penguatan moderasi beragama yang dimulai dari tahun 2018.⁴ Moderasi beragama pada intinya bukan hal yang baru, masyarakat Indonesia sudah terlahir dengan kepribadian yang toleran dan bertenggangrasa dengan berbagai keberagaman dan kemajemukan yang ada di sekelilingnya. Hal tersebut merupakan nilai-nilai yang dapat menjadi modal dasar dalam menjalankan moderasi beragama.⁵

Mewujudkan moderasi beragama dibutuhkan partisipasi aktif dan sikap yang arif dari seluruh elemen masyarakat Indonesia termasuk perempuan. Walaupun dalam sistem tatanan sosial kedudukan perempuan mengalami berbagai macam permasalahan dan berbagai macam rintangan, perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kerukunan di negara ini khususnya dalam mewujudkan moderasi beragama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Luh Rintis Rahayu dan Putu Surya bahwa semua perempuan dari berbagai agama yang ada di negara Indonesia (Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu) sepakat bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Melanjutkan hasil temuan tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut lagi mengenai peran, potensi dan tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan dalam mewujudkan moderasi bergama di Indonesia. Oleh karena itu, fokus pembahasan ini adalah untuk menguraikan peran perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama, serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia.

⁴ Ismail Cahyani, *Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama*. Kupang: Jurnal UNMUH Kupang. 2023, 15

⁵ Nina Mariani, *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*. Jakarta: Jurnal UIN Syarif Hidayatullah. 2015, 84

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yang berbentuk penelitian kualitatif. Penulis lebih menempatkan dengan tepat dan terbuka dengan banyaknya penguatan dampak mengenai konsep yang akan digunakan.⁶ Riset ini bercorak riset dekskriptif yang mana riset deskriptif ini mampu menghasilkan pola yang bagus mengenai sebuah keadaan beberapa kelompok secara valid.⁷ Riset ini merupakan jenis riset yang berbentuk kualitatif berupa teks dengan menggunakan teori gender. Data penelitian didapatkan dari artikel, buku, dan jurnal terkait peran dan tantangan perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama.⁸

DISKUSI TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Moderasi Beragama di Indonesia

Kehidupan beragama, sering adanya istilah “Islam moderat”, “Hindu Moderat”, atau “Kristen moderat”.⁹ Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Moderat berasal dari kata moderasi dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata moderasi juga berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman.¹⁰ Secara umum moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi

⁶ Guntoro. *Merancang Pembangunan Portal International Conference and Technology*. Kudus: Jurnal Penelitian Ilmiah dan Informatika IAIN Kudus. 2021, 37

⁷ Hidayat. *Perilaku Etis Pendidik dalam Pandangan Efikasi Diri*. Lampung: Jurnal UIN Raden Intan Lampung, 2010, 25

⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Press. 1990), 12

⁹ Mariani, Nina. *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*. Jakarta: Jurnal UIN Syarif Hidayatullah. 2015, 88

¹⁰ Nina Mariani, *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*. Jakarta: Jurnal UIN Syarif Hidayatullah. 2015. 89

negara.¹¹ Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis dan selalu bergerak. Hal ini disebabkan karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sebagai syarat moderasi beragama adalah dimilikinya pengetahuan yang luas dan mempunyai pemahaman keagamaan yang baik.¹²

Indonesia adalah negara yang multikultural, sangat beragam, sehingga dalam indikator komitmen kebangsaan ini diperlukan toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang yang tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, dan budaya. Indikator anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi atau ide gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Kekerasan atau tindakan radikalisme intinya adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Indikator akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat

¹¹ Ismail Cahyani, *Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama*. Kupang: Jurnal UNMUH Kupang. 2023, 31

¹² Mohammad Hasyim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*. (Oxford: Oxford University Press. 2015), 33

sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.¹³

Perilaku keagamaan orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa dan budaya. Keragaman yang dimiliki menimbulkan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan perpecahan. Sehubungan dengan hal tersebut moderasi beragama diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama merupakan suatu sikap dan perilaku dalam beragama yang selalu mengambil posisi tengah dan berusaha seimbang dalam pengamalan ajaran agama sendiri dan penghormatan terhadap agama lain yang berbeda. Sehingga sikap seimbang ini akan melahirkan perilaku yang adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu cara pandang beragama saja. Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi, atau toleran. Moderasi beragama adalah proses, dan jika moderasi diterapkan toleransi adalah hasil atau *outcome*.¹⁴

Tujuan utama digabungkan paham moderasi beragama oleh Kementerian Agama ialah untuk melindungi setiap masyarakat

¹³ Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2019), 42

¹⁴ Nazmudin. *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Tangerang: Journal of Government and Civil Society, 2017, 23

tanpa mempertajam perbedaan dan sebagai strategi dalam merawat keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Dalam mencapai tujuan ini, perlu digunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam moderasi beragama. Adapun prinsip-prinsip moderasi beragama yang dimaksudkan ialah: pertama, adil. Adil merupakan prinsip utama dalam moderasi beragama. Adil berarti dalam memandang, menyikapi dan mempraktikkan terhadap dua hal yang berbeda. Adil juga dapat diartikan dalam memberikan sesuatu sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Adil dalam bermoderasi ialah sikap tidak mengurangi, juga tidak melebihkan sesuatu. Kedua, seimbang. Seimbang antara urusan ukhrawi dan duniawi, materi maupun maknawi, tidak ekstrim dan tidak liberal. Seimbang merupakan sikap, dan komitmen untuk selalu mengutamakan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Seimbang tidak harus memberikan kadar yang sama, namun disesuaikan dengan keberfungsian. Ketiga, toleransi. Berarti bersikap toleran terhadap ragam perbedaan dan kebudayaan yang ada. Menentang sikap kekerasan yang bersumber dari paham radikal dan liberal baik dalam urusan agama maupun kehidupan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Toleransi dapat dirumuskan sebagai sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, dengan cara mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai,

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Indeks Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: KUB Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. 2019.

saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Sejak Indonesia Merdeka, apalagi sejak masa pemerintahan orde baru, banyak kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Agama, guna membangun dan merawat toleransi beragama di Indonesia. Namun ternyata tidak sepenuhnya meningkatkan sikap moderat dalam beragama dan tidak mampu menghindarkan konflik. Namun bila regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka konflik-konflik keagamaan tentu akan lebih banyak lagi terjadi.

B. Potensi dan Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama

Menciptakan moderasi beragama, perempuan merupakan makhluk yang sangat tepat dalam memegang peran tersebut. Hal ini didasari dari potensi besar yang dimiliki oleh perempuan sebagai akar dan dasar dalam menyemai benih-benih moderasi beragama. Potensi perempuan dalam memelihara moderasi beragama terkait dengan peran dasar yang diemban oleh perempuan, yaitu: pertama, sebagai seorang istri. Penerapan moderasi sebaiknya dimulai dari unit terkecil, yaitu dalam keluarga terutama dalam pola relasi dan interaksi suami-istri. Sebagai seorang ibu dan istri, perempuan dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator dalam kegiatan dan pekerjaan suami. Perempuan juga dapat berperan sebagai partner yang nyaman dan teman yang menyenangkan bagi suaminya. Sehingga ketika suami mengalami kesusahan atau kesedihan, suami tidak merasa sendiri dan kehilangan arah. Kesuksesan seorang suami tentunya akan dipengaruhi dari dukungan dari istri, bak kata pepatah dibalik suami yang sukses terdapat istri yang hebat. Suami-istri perlu berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Perbuatan dan sikap saling menghargai, menghormati dan saling menyayangi antar suami istri akan menjauhkan suatu keluarga dari berbagai macam

problem atau permasalahan intoleransi dalam sebuah keluarga yang dapat menghancurkan ketahanan keluarga, seperti kekerasan dalam keluarga, perselingkuhan, sikap egois dan mementingkan diri sendiri, ketidakpercayaan, ketidakpedulian terhadap sesama dan lain sebagainya.¹⁶

Keharmonisan yang ada di antara suami-istri tentu akan menjadi contoh yang baik bagi anak. Anak menjadikan orang tuanya sebagai panutan, ia akan belajar dari apa yang dilihatnya dari orang-orang terdekatnya (orang tuanya). Hal-hal positif yang dilihat anak akan menempel dan membentuk anak menjadi pribadi yang adil, penyanyang, peduli dan menghargai orang-orang disekitarnya, tanpa melihat perbedaan status, posisi dan atribut sosial lainnya. Kedua, sebagai seorang ibu. Berperan sebagai ibu, perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang besar dalam menciptakan kedamaian di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam keluarga ibu merupakan sekolah (madrasah) bagi anaknya. Ibu sosok pertama yang memberikan pendidikan dasar dan menanamkan nilai-nilai luhur pada anak sejak dini. Comenius dalam bukunya *Informatium*, yang dikutip oleh Jailani, menjelaskan bahwa permulaan pendidikan bagi anak ialah dalam keluarga yang dilakukan oleh ibu, Comenius menyebutnya dengan istilah ‘sekolah ibu’ atau dalam bahasa Latin “*Scholamatern*”¹⁷.

Membangun dan memelihara moderasi beragama haruslah ditanam dalam dirinya terlebih dahulu. Ketika seorang perempuan sudah menanamkan sikap toleransi sejak usia dini, maka hal itu akan terbawa secara terus-menerus di dalam keberlangsungan hidupnya. Perempuan harus bisa menyesuaikan dirinya untuk menciptakan keseimbangan, keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian. Peran perempuan menjadi salah satu faktor baiknya peradaban dan menjadi aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, perempuan memiliki hak untuk dimuliakan. Sejak pengutusan Rasul, diskriminasi terhadap wanita sebagian besar telah

¹⁶ S. Samsidar, *Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*. Jurnal Studi Gender Dan Anak. 2019. 25

¹⁷ Jailani, M. Syahrani. 2014. “*Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini*”. Jurnal Pendidikan Islam. 08 (2). 12

diberantas di seluruh dunia. Ilmu fardhu 'ain, atau ilmu agama merupakan salah satu bidang studi yang dapat membantu wanita mencapai potensi penuhnya. Hal ini merupakan teknik mendasar bagi seorang wanita untuk mengenal dirinya sendiri, menjadi tangguh dan kuat.¹⁸

Sebagai seorang ibu, perempuan memiliki tiga pokok emosi keibuan, yaitu: seorang ibu memiliki hati yang lembut, memiliki sifat tidak egois atau lebih mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan sendiri, memiliki rasa kasih sayang yang tinggi. Ada beberapa peran ibu sebagai pendidikan yaitu: pertama, memberikan contoh; kedua, membentuk tingkah laku; ketiga, memberikan kasih sayang; keempat melatih kepribadian anak; kelima, mengenalkan anak pada ajaran agama dan; dan keenam, mengajari sopan santun.¹⁹ Sejalan dengan pendapat di atas, menurut.²⁰ salah satu peran ibu ialah ibu sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu dan moral pada sang anak. Selanjutnya ibu memiliki ikatan yang kita dengan anaknya yang tertanam sejak dini. Ibu berperan dalam memberikan pendidikan karakter sedini mungkin. Terutama direntang usia 0-6 tahun saat otak anak berkembang sangat pesat sampai 80%. Maria Montesari seorang pakar pendidikan anak usia dini menyebutkan bahwa usia 6 tahun ke bawah adalah usia keemasan anak (*golden age*) karena di masa anak sudah peka dalam menerima stimulus rangsangan dari lingkungannya. Pada fase ini anak akan merespon stimulus dan mewujudkannya dalam perilaku kesehariannya, anak menerima stimulus sebagai dasar-dasar pengetahuan dan perkembangan proses berfikirnya.

Di usia *golden age* ibu memiliki peluang emas untuk berinvestasi dalam merancang kualitas anak. Ibu dapat menanamkan nilai-nilai moderasi beragama seperti nilai keadilan, toleransi, tenggang rasa, cinta, damai,

¹⁸G. A., Wahab, & Kahar, M. I. 2022. *Perempuan dan Moderasi Beragama*. Jakarta: Jurnal Refleksi, 41

¹⁹B. Surahman, *Peran Ibu Terhadap Masa Depan Anak*. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak. 2019, 43

²⁰B. Surahman, *Peran Ibu Terhadap Masa Depan Anak*. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak. 2019, 44

menjauhi kekerasan, tidak fanatik, saling menghormati dan tanggung jawab ke dalam diri si anak. Sebagai contoh, dalam menanamkan nilai keadilan kepada anak, ibu bisa mengajarkannya melalui sikap dengan memberikan kasih sayang sama antar anak, tidak membedakan antara anak pertama dengan anak yang lainnya. Ibu memiliki peluang untuk menanamkan nilai-nilai melalui pendidikan karakter kepada anak. Penanaman nilai-nilai karakter dapat dilakukan melalui metode pembiasaan dan keteladanan yang terus menerus dipraktekkan dalam keseharian²¹.

Pendidikan karakter terhadap bukan hanya agar anak bisa bersikap patuh, tapi memberikan kesadaran bahwa nilai-nilai tersebut baik untuk dirinya dan lingkungannya dan mengamalkannya secara terus menerus dalam kehidupannya nanti. Oleh karena itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) yang baik sampai anak menjadi paham (*cognitive*) antara baik dan salah, merasakan (afektif) nilai yang baik dan buruk serta mampu mengamalkannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan yang dilakukan kepada anak oleh ibu lebih menekankan pada habit atau kebiasaan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan yang baik, tapi juga harus menggunakan *moral feeling* dan moral action. Anak yang mendapatkan pendidikan karakter dari orangtua terutama dari seorang ibu, maka akan tertanam nilai-nilai keadilan, tanggungjawab dan saling menghargai dalam tumbuh kembang anak tersebut. Dengan begitu, anak dapat berperan dan mengambil andil dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari potensi perempuan di atas dapat dipahami bahwa perempuan sangat berperan dalam mewujudkan moderasi beragama yang dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Perempuan bisa mewujudkannya dalam memberikan edukasi kepada anak dan keluarganya terkait moderasi dan bisa juga melalui pembentukan karakter anak sejak dini.²²

²¹ E, Mulyasa, *Karakter Manusia Indonesia*. (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013). 12.

²² R. Rianawati, *Peran Ibu dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Menurut Pandangan Islam*. Lampung: Jurnal Al-Adyan. 2014. 73

C. Tantangan Perempuan dalam Menciptakan Moderasi Beragama

Perempuan memiliki potensi dan peluang yang besar dalam menjaga keanekaragaman yang ada di Indonesia, namun potensi ini belum digunakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan perempuan masih mengalami ketidakadilan gender baik di ranah domestik maupun publik. Peran perempuan secara domestik menggambarkan tentang aktivitas atau pekerjaan perempuan yang berkaitan dengan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika dan lain sebagainya. Sedangkan peran perempuan secara publik menggambarkan peran perempuan sebagai perempuan karir yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah.²³ Perempuan masih menjadi korban bias gender yang bermula dari kesenjangan gender dalam berbagai akses kehidupan sosial. Sebagai gambaran laki-laki mendapat pengakuan dan berkuasa atas perempuan. Hubungan hirarki antara laki-laki dan perempuan dianggap suatu hal yang normal dan benar dalam pemahaman masyarakat Indonesia. Pola kesenjangan ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara.²⁴

Subordinasi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang dapat menjadikan perempuan tidak maksimal menggunakan potensi yang dimiliki dalam mewujudkan moderasi beragama. Praktek di masyarakat masih menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki, seorang perempuan/ibu tidak memiliki hak untuk berpendapat dalam pengambilan sebuah keputusan. Contoh praktiknya dapat dilihat dari kasus yang sempat viral di sosial media mengenai seorang istri di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat

²³ Hidayat. *Perilaku Etis Pendidik dalam Pandangan Efikasi Diri*. Lampung: Jurnal UIN Raden Intan Lampung. 2010, 40

²⁴ Kusuma, Intan. *Peran Perempuan dalam Membangun Moderasi Beragama*. Riau: Jurnal UIN SUSKA Riau. 2020. 19

yang dituntut pidana satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum karena memarahi suami yang pulang dalam kondisi mabuk. Kasus ini menunjukkan realita bahwa perempuan masih menjadi korban dari hirarki yang ada. Peran ganda juga menjadi ialah satu hambatan dalam mewujudkan moderasi bergama bagi perempuan.²⁵

Pada masyarakat industri yang berbasis *money oriented*, terjadi pergeseran peran perempuan dari ranah domestik ke ranah publik atau peran ekonomis. Bagi istri yang memiliki pekerjaan di luar rumah akan memainkan peran ganda, yaitu bertanggung jawab untuk pekerjaan rumah dan pekerjaan di luar rumah. Hal ini dilakukan guna menjaga kestabilan ekonomi, istri terkadang dituntut berperan aktif bekerja di luar rumah seperti di kebun, pasar, sekolah, perkantoran dan lainnya. Terjunnya perempuan ke ranah publik tidak menjadikan beban domestik berkurang. Justru terkadang perempuan karir dianggap tidak maksimal dalam mengerjakan pekerjaan domestik. Akibatnya, perempuan akan memiliki beban ganda dan dituntut dapat menjalankan beban domestik dan publik dengan baik. Selanjutnya, praktik peran ganda semakin parah di masyarakat karena adanya budaya tabu bagi suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga timbullah sikap suami yang santai sembari bermain gadget di tengah-tengah kesibukkan istri menyiapkan kebutuhan anggota keluarga, ironisnya tak jarang bahkan suami meminta dilayani seperti agar dibuatkan kopi. Ada budaya yang berlaku umum dalam kebiasaan masyarakat bahwa suami bisa beristirahat setelah bekerja di luar rumah, namun istri tetap harus menyediakan kebutuhan

²⁵Nurul Ihsani, Nina Kurniah, dkk, "Hubungan Metode Pembiasaan Dalam Pembelajaran Dengan Disiplin Anak Usia Dini", 2018. 17

anggota keluarga meskipun juga telah seharian bekerja di luar rumah.²⁶

Kondisi ini menjadikan istri tidak maksimal dalam menanamkan benih-benih moderasi beragama. Sebaliknya, kondisi ini bisa menjadikan anak bersikap superioritas dan tidak peka terhadap kesulitan-kesulitan orang di sekitarnya, karena bagi anak orang tua adalah model dalam berperilaku dan bersikap. Selain subordinasi dan peran ganda, bentuk ketidakadilan gender lainnya, seperti stereotip gender, marginalisasi dan kekerasan masih menjadi hambatan bagi perempuan. Pada prakteknya di masyarakat perempuan masih menerima ketidakadilan dan perbedaan dari laki-laki. Keadaan seperti ini dapat menghalangi potensi strategis yang dimiliki perempuan dalam menebarkan benih-benih moderasi beragama bagi orang-orang disekitarnya. Lebih lanjut, bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi anak untuk peka terhadap nilai keadilan dan toleransi yang merupakan prinsip utama dalam menjalankan praktek moderasi beragama. Selama perempuan masih menjadi korban ketidakadilan dan perlakuan bias gender, maka moderasi beragama sulit akan berjalan secara maksimal.²⁷

D. Faktor Pendukung Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama

Peran sebagai ibu dan istri dapat maksimal dijalankan perempuan jika dalam pelaksanaannya mendapat fasilitas dan dukungan. Memaksimalkan peran yang dimiliki perempuan

²⁶ S. Zuhdi, *Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri*. Jurnal Jurisprudence. 2019, 38

²⁷ I. S. Masruroh, *Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud*. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak. 2022, 42

kaitannya dengan mewujudkan moderasi beragama perlu difasilitasi. Hal ini dikarenakan agar proses penyemaian bibit-bibit moderasi beragama berupa nilai keadilan, keberagaman, toleransi dan rendah hati kepada anak sejak dini dapat dilakukan secara efektif. Sehingga dari potensi-potensi besar yang dimiliki oleh perempuan nantinya dapat melahirkan generasi-generasi yang paham dengan persaudaraan di tengah keanekaragaman yang ada, jauh dari sikap ekstrim, radikal dan eksklusif yang menjadi masalah utama dalam menjaga kedamaian dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Berikut fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang potensi yang dimiliki perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama, yaitu: pertama, adanya lingkungan sekitar yang kondusif bagi perempuan. Lingkungan sekitar yang dimaksud disini ialah orang-orang terdekat perempuan seperti orang tua, suami dan lainnya. Orang-orang terdekat ini mampu menjadi orang pertama yang memberikan dukungan terhadap peran perempuan tersebut. Dukungan ini berupa menjaga perempuan dari perbuatan-perbuatan yang mengandung ketidakadilan gender. Membuat lingkungan yang nyaman bagi perempuan untuk terus produktif, bertanggungjawab dan leluasa dalam menuangkan aspirasinya. Perempuan yang berada dikondisi ini akan memiliki kondisi fisik dan psikologis yang baik, sehingga dapat menyemai benih-benih toleransi secara efektif.

Kedua, menyediakan akses bagi perempuan untuk mudah memperoleh informasi. Fakta menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang menggunakan handphone atau telepon genggam cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Padahal

²⁸ E. Mulyasa. *Manajemen Pendidikan Karakter*. (Jakarta: Bumi aksara, 2018) 29

handphone saat ini menjadi alat komunikasi yang sangat berpeluang dalam memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan saat ini. Maka tidak heran laki-laki cenderung lebih memiliki pengetahuan jika dibandingkan dengan perempuan. Ketiga, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis baik di ruang domestik maupun publik. Selama ini pengambilan keputusan strategis didominasi oleh laki-laki. Maka diperlukan upaya untuk melibatkan perempuan secara aktif pada posisi tersebut Hal ini sangat penting agar perempuan dapat secara bebas menggunakan hak-hak dan potensi yang mereka miliki. Partisipasi perempuan harus ditingkatkan dengan menempatkan mereka pada peran sentral dalam pengambilan keputusan strategis, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan perempuan. Keempat, menyediakan tempat ramah perempuan. Perbedaan fisik dari laki-laki dan adanya tugas reproduksi menjadikan perempuan perlu mendapatkan keistimewaan, salah satunya ialah tersedianya ruang laktasi atau childcare ditempat-tempat umum seperti di kendaraan umum, perkantoran dan lainnya. Kelima, menyediakan kuota yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang. Memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam akses pendidikan, partisipasi ekonomi, kesehatan dan politik.²⁹

KESIMPULAN

Perempuan memiliki peran dan peluang yang besar dalam menciptakan moderasi beragama di negeri ini. Peran perempuan sebagai istri dan ibu bisa menjadikan mereka sebagai pelopor yang berkontribusi dalam mendidik generasi bangsa agar memiliki rasa toleransi terhadap setiap agama. Perempuan memiliki

²⁹ L. W. Evelina, *Analisis Isu S (Suku) A (Agama) R (Ras) A (Antar Golongan) di Media Sosial Indonesia*. Jakarta: Jurnal ULTIMA. 2015, 91

peran yang besar dalam membentuk dan memelihara toleransi sehingga perempuan dapat menjadi aktor utama untuk menciptakan moderasi dalam keluarga agar tidak tersebarnya sebuah ideologi kekerasan. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya sikap toleransi yang ditimbulkan oleh seorang anak ketika berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, peran tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal oleh perempuan jika mereka masih menjadi korban ketidakadilan gender. Untuk itu, diperlukan dukungan dari semua pihak untuk memberikan fasilitas dan akses bagi perempuan untuk dapat memaksimalkan peran tersebut dalam rangka mewujudkan moderasi beragama. Diharapkan di masa mendatang adanya sebuah perhatian dan pengakajian secara serius terhadap potensi perempuan tersebut, sehingga warga negara Indonesia bisa hidup damai, rukun dan tentram serta kesatuan dan keutuhan NKRI tetap bisa terjaga dengan baik hingga akhir nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Ismail. *Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama*. Kupang: Jurnal UNMUH Kupang. 2023.
- E. Mulyasa. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi aksara, 2018.
- Elina, Marina. *Moderasi Beragama dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama*. Palembang: Jurnal UIN Raden Fatah. 2021
- Evelina, L. W. *Analisis Isu S (Suku) A (Agama) R (Ras) A (Antar Golongan) di Media Sosial Indonesia*. Jakarta: Jurnal ULTIMA. 2015.
- Guntoro. *Merancang Pembangunan Portal International Conference and Technology*. Kudus: Jurnal Penelitian Ilmiah dan Informatika IAIN Kudus. 2021.
- Hidayat. *Perilaku Etis Pendidik dalam Pandangan Efikasi Diri*. Lampung: Jurnal UIN Raden Intan Lampung, 2010.
- Kamali, Mohammad Hasyim. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University Press. 2015.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Indeks Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: KUB Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. 2019.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2019.
- Kusuma, Intan. *Peran Perempuan dalam Membangun Moderasi Beragama*. Riau: Jurnal UIN SUSKA Riau. 2020.
- Mariani, Nina. *Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia*. Jakarta: Jurnal UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
- Masruroh, I. S. *Kesetaraan Gender Perempuan Bali dalam Pandangan Amina Wadud*. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak. 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Press. 1990.
- Nazmudin. *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Tangerang: Journal of Government and Civil Society, 2017.
- Nugroho, H. *Dekonstruksi Wacana SARA Negara dan Implikasinya Terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 1997.
- Rianawati, R. *Peran Ibu dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Menurut Pandangan Islam*. Lampung: Jurnal Al-Adyan. 2014.
- Samsidar, S. *Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*. Jurnal Studi Gender Dan Anak. 2019.
- Surahman, B. *Peran Ibu Terhadap Masa Depan Anak*. Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak. 2019.
- Wahab, G. A., & Kahar, M. I. *Perempuan dan Moderasi Beragama*. Jakarta: Jurnal Refleksi. 2022.
- Zuhdi, S. *Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri*. Jurnal Jurisprudence. 2019.